

NASKAH AKADEMIK

**PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI PADA PERUSAHAAN
PENAMBANGAN PASIR NANDO GEMILANG DI CANGKRINGAN
SLEMAN**



Disusun Oleh:

ENGGAR HARI SETYANTO

N P M : 03 05 08426

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi & Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH AKADEMIK

**PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI PADA PERUSAHAAN
PENAMBANGAN PASIR NANDO GEMILANG DI CANGKRINGAN
SLEMAN**

Disusun oleh :

ENGGAR HARI SETYANTO

NPM

: 030508426

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Ekonomi & Bisnis

Telah Disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Maret 2014

Dosen Pembimbing,



E. Imma Indra Dewi W., SH., M. Hum.

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI PADA PERUSAHAAN PENAMBANGAN PASIR NANDO GEMILANG DI CANGKRINGAN SLEMAN

ABSTRAKSI

Judul penelitian ini adalah: Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang di Cangkringan Sleman. Penelitian ini membahas mengapa Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayar upah untuk para pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 370 /KEP/ 2012 Tentang Upah Minimum Provinsi dan usaha untuk menyelesaikan permasalahan oleh pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan Upah Minimum Provinsi di Pasir Nando Gemilang Perusahaan pertambangan dan untuk mencari tahu dan menganalisis upaya untuk memecahkan masalah oleh pekerja. Metode penelitian ini adalah hukum empiris penelitian yang fokus pada perilaku masyarakat hukum. Sebagai sumber utama adalah wawancara dengan responden dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak menerapkan peraturan karena tidak tahu peraturan dan begitu jauh ada tidak ada pekerjaan pelamar pekerja orang menuntut upah yang lebih tinggi. Untuk menyelesaikan kendala Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang harus lebih banyak belajar tentang peraturan bahwa hak pekerja dapat dipenuhi dengan baik.

Kata Kunci: Upah minimum, undang-undang Ketenagakerjaan, pertambangan pasir

ABSTRACT

The title of this research is: “Implementation Of The Minimum Wage Province On Nando Gemilang Sand Mining Company In Cangkringan Sleman”. This research discussed why Nando Gemilang Sand Mining Company not paying wages to workers according with Act Number 13 in 2003 and Governor Decree of DIY Number 370/KEP/2012 about Minimum Wages Province. And effort to solve the problem by workers. The purpose of this research is to find out and analyzing constraint implementation of the minimum wages province on Nando Gemilang Sand Mining Company and to find out and analyzing the effort to solve the problem by workers. The method of this research is empirical legal research that focus on the behavior of law community . As the main sources is interview with respondent and study of literature. The result of this research is Nando Gemilang Mining Company not implement the regulation because do not know the regulation and so far there are no applicants work is people workers are demanding higher wages. To settle these constraints Nando Gemilang must be more learn about the regulations that the right of workers could be met with good.

Keyword : Minimum wages, Employment, Sand Mining, Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan mengenai upah minimum ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh para pengusaha, termasuk industri kecil. Menurut SK.No.370/KEP/2012 yang ditandatangani oleh Gubernur Yogyakarta, disebutkan bahwa besarnya Upah Minimum Propinsi Yogyakarta tahun 2013 adalah sebesar Rp. 947.114 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah Propinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal tidak atau belum mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu.¹

Bagi warga di Kecamatan Cangkringan, industri ini membawa dampak besar dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, pekerja yang terserap bukan hanya berasal dari warga sekitar sendiri, tetapi juga

¹ Adrian Sutedi, SH, MH., 2009 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, jakarta, Hal 143.

melibatkan pekerja dari luar daerah Kecamatan Cangkringan. Salah satu perusahaan penambangan pasir itu adalah Perusahaan Nando Gemilang. Perusahaan ini mempunyai masalah pengupahan yang besarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi ?

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR DIY SK.NO 370/KEP/2012

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah

suatu hubungan antara pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja/buruh dan pengusaha dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja/buruh.

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Pengertian Perjanjian Kerja menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu pengertian tentang perjanjian kerja juga diketengahkan oleh seorang Pakar Hukum Perburuhan Indonesia, R. Imam Soepomo yang menerangkan bahwa Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu, pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya,

pengusaha yang mengikatkan diri untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan membayar upah.²

2. Unsur Perjanjian Kerja

Menurut Sendjum W. Manulang, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, antara lain menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) unsur atau faktor yang menentukan adanya hubungan kerja tanpa adanya salah satu dari keempat unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja.³ Dari beberapa pengertian perjanjian kerja diatas jelas sekali menunjukkan bahwa yang terikat dalam perjanjian kerja adalah kedua belah pihak, baik pihak pekerja/buruh maupun pihak pengusaha. Pihak pekerja mengikatkan dirinya untuk bekerja dan mempunyai hak untuk menerima upah. Pihak pengusaha mengikatkan dirinya untuk mempekerjakan pekerja/buruh serta wajib membayar upah.

Dari berbagai macam definisi dan rumusan perjanjian kerja di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paling tidak ada empat unsur agar suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian kerja. Keempat unsur agar perjanjian dapat disebut perjanjian kerja adalah:

- a. Ada pekerjaan
- b. Ada upah
- c. Di bawah perintah

² Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, PPAKRI Bhayangkara, Jakarta, 2005 hlm.57

³ Sendjum W. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Penerbit Rieneka Cipta, Jakarta, 2003 Cet. I, hlm.64

d. Waktu Tertentu

B. Latar belakang Perusahaan Penambangan Pasir di Cangkringan Sleman.

Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan dimana dalam proses produksinya memerlukan tenaga kerja dalam menjalankan usahanya. Selain itu diperlukan juga alat berat beserta tenaga kerja yang berpengalaman dalam pengoperasiannya untuk menunjang proses produksinya. Perusahaan pertambangan pasir Nando Gemilang merupakan jenis industri kecil, menurut Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Industri Kecil, Perusahaan Penambangan Pasir merupakan jenis industri kecil, hal ini dikarenakan merupakan industri sektor energi dan sumber daya mineral yang memerlukan proses penambangan dengan cara tertentu demi menjaga kualitas yang baik. Perusahaan Nando Gemilang sangat tergantung pada cuaca dan bahan material dari Gunung Merapi, jika cuaca di sekitar puncak gunung Merapi mendung maka dapat dipastikan akan terjadi hujan di daerah puncak, sehingga akan mengakibatkan adanya banjir lahar dingin yang mengalir ke daerah Kecamatan Cangkringan. Aliran lahar dingin itulah yang merupakan bahan baku utama untuk produksi penambangan pasir.

Dalam perkembangannya Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor- faktor yang diduga mempengaruhi perkembangan industri penambangan pasir adalah modal,

tenaga kerja dan bahan baku. Dalam suatu industri faktor tenaga kerja sangat penting guna menunjang kelancaran produksi. Pekerja/buruh yang bekerja di industri penambangan pasir di Kecamatan Cangkringan ini mayoritas berasal dari daerah Kecamatan Cangkringan itu sendiri tetapi ada banyak juga yang berasal dari luar Kecamatan Cangkringan, bahkan tenaga kerja ada yang berasal dari keluarga sendiri. Hal ini disebabkan untuk mengefektifkan kerja dan dalam rangka penghematan biaya produksi, karena tenaga kerja dari keluarga sebagian besar tidak dibayar. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang dalam proses produksinya mempekerjakan 25 (dua puluh lima) pekerja/buruh untuk menjadi pengeruk pasir, dari semua pekerja/buruh yang bekerja semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan tingkat pendidikan terakhir adalah SMA (Sekolah Menengah Atas). Dalam penelitian ditemukan pengertian hak dan kewajiban para pihak yang lahir dari hubungan kerja pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan kepada responden tentang hak dan kewajiban para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban Pekerja adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan bidang tugasnya secara baik dan benar, sedangkan hak pekerja adalah menerima upah sebesar sesuai yang telah diperjanjikan.
- b. Hak dan Kewajiban Pengusaha adalah membayar upah kepada pekerja sedangkan hak pengusaha adalah menerima hasil kerja yang diperoleh

pekerja selama melakukan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Rata-rata pekerja/buruh pada industri ini bekerja selama 8 jam tiap hari dengan upah kerja rata-rata Rp 15.000 – 25.000/hari. Upah yang diberikan berdasarkan upah bulanan yang diterima setiap bulannya. Proses awal dalam penerimaan pekerja pada perusahaan penambangan pasir adalah dengan disepakatinya perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Kesepakatan perjanjian kerja tersebut terjadi apabila para pihak pekerja/buruh telah memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah menyerahkan daftar riwayat hidup dan identitas dari pekerja/buruh yang bersangkutan disertai dengan menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk asli. Perusahaan dalam menerima pekerja/buruh wajib untuk memberikan penjelasan hal-hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Menurut jenisnya perjanjian kerja dibedakan atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perjanjian waktu tertentu adalah perjanjian yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam perjanjian kerja, harus dibuat secara tertulis dan dalam huruf latin menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu jangka waktu berlakunya tidak disebutkan dalam perjanjian kerja, tidak disebutkan untuk berapa lama pekerja harus melaksanakan pekerjaan tersebut, dapat dibuat

secara tertulis atau lisan. Selain itu bentuk tulisan dan bahasa yang digunakan adalah bebas.

Menurut hasil wawancara dengan responden, kurangnya penyuluhan dan bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman mengakibatkan pengusaha kurang memahami ketentuan yang terdapat dalam Hukum Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha mempunyai anggapan bahwa peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman kurang optimal. Kurangnya pemahaman pengusaha dan pekerja itu sendiri menyebabkan hubungan kerja yang tidak seimbang. Artinya pengusaha hanya memikirkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh, hal ini tidak disadari oleh pekerja dan karena keterbatasan pengetahuan pekerja/buruh hanya bisa diam karena disamping merasa posisinya lemah, para pekerja/buruh tidak mempunyai pengetahuan di bidang Hukum Ketenagakerjaan.

C. Pelaksanaan upah minimum propinsi pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang di Kecamatan Cangkringan Sleman.

Upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor SK.No.370/KEP/2012 mengacu pada Pasal 89 ayat 1 huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan Wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang dalam memberikan upah kepada karyawan tidak berdasarkan bobot dari kriteria calon pekerja yang akan melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut, melainkan besar kecilnya upah yang akan diberikan pengusaha kepada pekerja berdasarkan kinerja dan kondisi yang berlaku saat itu. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh, pengusaha bertindak semaunya yang penting pengusaha sudah memberikan upah sesuai perjanjian yang telah disepakati, hal ini terjadi karena pengetahuan dan pemahaman pengusaha mengenai hukum perburuhan sangat kurang. Menurut penulis Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus dioptimalkan, dalam hal ini adalah perlu ditingkatkan kegiatan penyuluhan kepada para pengusaha mengenai bidang Ketenagakerjaan.

Kebijakan pemerintah untuk melindungi upah pekerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2013 adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum pada 5 (lima) Kabupaten/Kota disebutkan dalam lampiran Keputusan Gubernur tersebut bahwa upah Minimum untuk Kabupaten/Kota tahun 2013 adalah sebesar Rp. 947.114 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah). Dikatakan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah upah bulanan terendah. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan tingkat kerja paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu pengusaha dan para pekerja, Upah yang diberikan pada pekerja/buruh adalah antara Rp. 500.000 – Rp. 750.000 per bulan. Dalam pelaksanaan pengupahan tersebut perusahaan Nando Gemilang menerapkan asas “*no work no pay*”. Dasar dari pelaksanaan asas tersebut adalah Pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun demikian, ada pengecualian pemberlakuan asas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan upah pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang terhadap pekerjanya adalah upah tetap yang diberikan adalah Rp. 500.000-Rp. 750.000, pengusaha hanya akan memberikan bonus apabila pekerja melakukan pekerjaan diluar perjanjian kerja. Misalnya ada pesanan khusus yang mengakibatkan pekerja/buruh harus bekerja dengan ekstra waktu, maka pekerja/buruh tersebut akan diberikan bonus yang besarnya antara Rp. 10.000-Rp. 15.000. Upah yang diberikan kepada pekerja jelas tidak memenuhi ketentuan upah minimum. Pada Pasal 90 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang tidak mampu membayar upah Minimum dapat dilakukan penangguhan. Pelaksanaan pengupahan pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang lebih rendah dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Oleh

karena itu pengusaha telah melanggar ketentuan mengenai upah minimum meskipun para pengusaha mempunyai alasan-alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Alasan para pengusaha tidak menerapkan upah minimum propinsi sebesar Rp 947.114/bulan adalah:

- a. Adanya penurunan Produktifitas dikarenakan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
- b. Omzet penjualan tidak menentu.
- c. Pengusaha menganggap sudah melaksanakan kewajiban karena membayar upah sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pekerja/buruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman, belum pernah ada permohonan penangguhan yang dilakukan oleh Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang. Secara faktual dilapangan, dalam kurun waktu tahun 2009-2012, tidak ada satu pun perusahaan yang melakukan penangguhan upah dari pengusaha di Kabupaten Sleman. Hal tersebut disampaikan oleh kepala seksi Ubin Saker (hubungan industrial dan syarat kerja) Bapak Djoko Murdjanto, SH, diterangkan pula bahwa perusahaan-perusahaan yang meminta penangguhan sampai saat ini belum juga menerapkan Upah Minimum Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil wawancara dengan Bapak Djoko Murdjanto, SH, diterangkan juga bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya akan bertindak apabila ada pengaduan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kendala Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 Tentang Upah Minimum Propinsi adalah:

- a. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak mengetahui jika ada peraturan yang mewajibkan perusahaan dilarang untuk membayarkan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
- b. Tidak ada pelamar pekerjaan yang menuntut pembayaran upah sesuai dengan upah minimum.
- c. Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang mayoritas adalah pekerjaan yang membutuhkan fisik.

Penyelesaian dari kendala yang dihadapi Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang adalah:

- a. Secara prinsip setiap warga negara dianggap tahu hukum, asas ini dikenal dengan Asas Fictie Hukum. Sehingga tidak ada alasan tidak mengetahui Undang-Undang tersebut, karena ketidaktahuan bukan alasan pemaaf.

- b. Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang lebih membuka diri kepada pelamar kerja dengan membuka lowongan pekerjaan yang sesuai dengan memperhatikan kualifikasi perusahaan dan tingkat pendidikan, dan dapat juga memberi informasi kepada masyarakat luas bahwa mereka siap merekrut untuk dijadikan pekerja sesuai kualifikasi perusahaan dan tingkat pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, diharapkan peran pemerintah melalui Depertemen Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih dimaksimalkan dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak menerapkan upah sesuai dengan upah minimum. Hal ini sangat penting karena dimaksudkan agar kesejahteraan pekerja/buruh maupun bagi keluarga dari pekerja/buruh dapat terpenuhi.

Selain itu bagi pihak perusahaan atau pengusaha agar mengubah cara pandang mereka terhadap pekerja/buruh yang selama ini mengira karena keterbatasan pendidikannya tidak mampu bekerja dengan baik. Sedangkan bagi pekerja diharapkan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka dan tidak malu karena keterbatasannya agar perusahaan tidak ragu untuk mereka merekrut mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Khakim, S.H., 2006, *Aspek Hukum Pengupahan, Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Adrian Sutedi, SH, MH., 2009 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Darwan Prinst, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Hardijan Rusli, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta